

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah di bandingkan anak-anak seusianya. Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang di tandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Menurut Lestari & Kristiana (2018) menyatakan stunting merupakan masalah gizi utama yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. selain itu stunting dapat berpengaruh pada anak dan balita pada jangka panjang yaitu dapat mengganggu kesehatan, pendidikan serta produktivitas nya di masa yang akan datang,(Yusmaniarti,2023). Menurut Kemenkes RI (2018), Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang di sebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik

dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai *Intelligence Quotient (IQ)* lebih rendah dibandingkan rata – rata *IQ* anak normal (Rahmadhita,2020).

Kasus kekurangan gizi atau stunting di Indonesia masih terus meningkat. Stunting yaitu suatu keadaan pada anak yang berumur kurang dari 5 tahun yang mengalami keterlambatan dalam tumbuh dan kembangnya yang di akibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi stunting akan tampak setelah bayi berusia 2 tahun di mana panjang atau tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi (SD). Angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 21,5%, di tahun 2024 masih dalam target pencapaian dengan target penurunan sebesar 14% (“Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia”, 2024).

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya stunting di antaranya yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Adapun Penyebab langsung dipengaruhi pada variable asupan gizi, pengetahuan gizi ibu, kadarzi, dan riwayat penyakit infeksi. Sedangkan secara tidak langsung di pengaruhi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Anak stunting akan mengalami hambatan pada perkembangan otaknya, yang berpengaruh pada kemampuan psikis anak. Anak akan kesulitan untuk mengingat, menyelesaikan masalah, dan terhambat pada aktivitas yang melibatkan kegiatan mental atau otak.

Konsep jejaring kebijakan (*policy networks*) menganalisis hubungan antara jejaring-jejaring kebijakan yang dapat di identifikasi dan hasil-hasil kebijakan yang di buat, melalui pemahaman susunan kelembagaan dari jejaring yang ada, di mana jenis-jenis kebijakan berhubungan dengan jenis-jenis jejaring tertentu. Ide

dan konsep policy networks di gunakan untuk menggambarkan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi dan definisi kebijakan publik. Ketergantungan antara beberapa aktor dalam network tersebut di karenakan ketidakmampuan mereka untuk mencapai atau memenuhi tujuan secara sendiri, melainkan memerlukan sumber daya yang lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya untuk bekerjasama (Jehansyah,2018).

Salah satu daerah yang mengalami stunting pada anak adalah Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdasarkan posisi geografisnya berbatasan dengan Kabupaten Belu di utara, Laut Timor di selatan, Negara Timor Leste di timur, dan kabupaten TTU dan TTS di bagian barat. Secara administrative, kabupaten Malaka memiliki luas wilayah mencapai 1.160,63 Km², terbagi atas 12 Kecamatan serta 127 Desa dan Beribukota di Betun. Angka stunting di Kabupaten Malaka pada tahun 2023 mencapai 15,9%.

Desa Kereana Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka merupakan salah satu Desa yang dimana anak-anak masih mengalami gangguan pada pertumbuhan atau stunting yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pola asuh kurang efektif dan pola makan yang tidak teratur. Angka stunting di Desa Kereana pada tahun 2023 mencapai 08%. Salah satu sumber masalah stunting di Kabupaten Malaka adalah gizi buruk pada ibu dan anak, kurangnya asupan gizi pada ibu sejak sebelum hamil, selama kehamilan, sehingga menyebabkan tingginya angka stunting di kabupaten Malaka.

Jaringan kebijakan diperlukan untuk menjawab masalah sosial yang bersifat kompleks. Kebijakan ini tidak tepat menempatkan target group hanya sebagai objek kebijakan melainkan harus menjadikannya sebagai subjek atau pelaku dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Konsep jaringan kebijakan menghubungkan kebijakan public dengan konteks strategis dan terlembaganya: jaringan publik, semi-publik, dan actor swasta yang berpartisipasi dalam bidang kebijakan tertentu. Konsep ini baru dalam arti bahwa ia menggabungkan wawasan dari ilmu kebijakan, yang berfokus pada analisis proses kebijakan public, dengan ide-ide dari ilmu politik dan teori organisasi tentang distribusi kekuasaan dan ketergantungan, fitur organisasi dan hubungan organisasi. Sebagai jaringan kebijakan fenomena empiris dapat ditemukan di hampir setiap bidang kebijakan. (AR Hidayat, 2015)

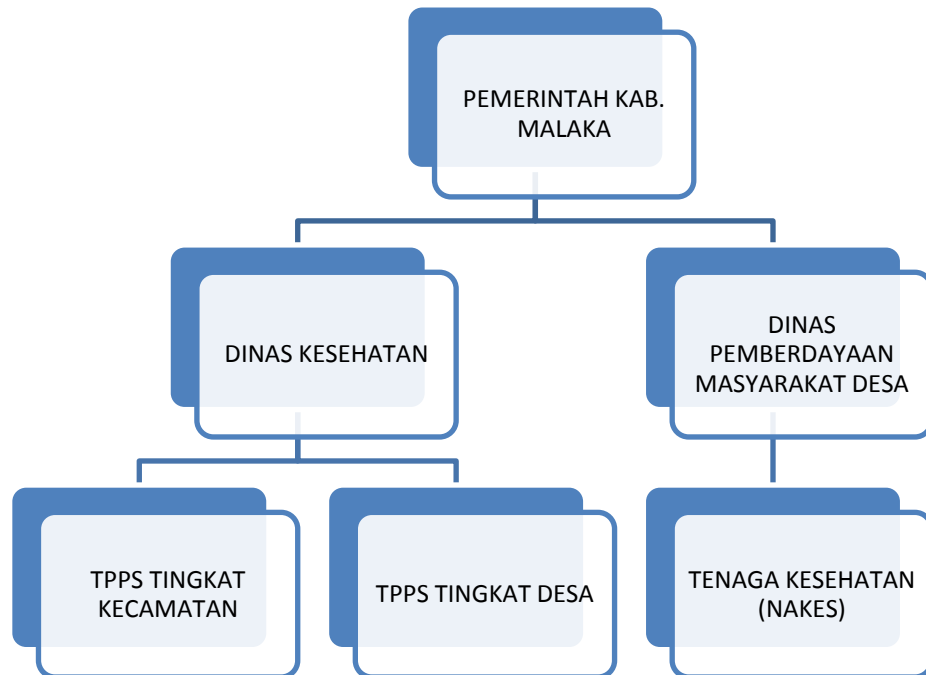
Jaringan kebijakan (*policy network*) digambarkan dalam beberapa kategori. Pertama, di deskripsikan sebagai aktor-aktor. Kedua, hubungan (*linkages*) di antara aktor-aktor. Ketiga, batas atau *boundary* (Kenis & Schneider, 1991 dalam Carlsson, 2000), (Sri Suwitri, 2008). Sementara Rhodes menggunakan istilah jaringan untuk menggambarkan beberapa pihak yang terkait dalam rangka pemberian pelayanan. Jaringan-jaringan ini di buat oleh organisasi-organisasi tersebut dengan saling mempertukarkan sumber daya (misalnya uang, informasi, keahlian) untuk mencapai tujuannya, untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap hasil, dan untuk menghindari ketergantungan pada pihak lain dalam menjalankan peranannya.

Pemerintah menargetkan stunting di Indonesia akan turun menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, perlu upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita stunting 7% per tahunnya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Perpres No.72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini mengatur terkait penanganan stunting antara lain mengenai strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan program percepatan penurunan stunting, koordinasi program penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan pendanaan penanganan kasus stunting.

Dalam Jejaring kebijakan pengentasan stunting di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka pemerintah membangun jaringan antar aktor yang terlibat dengan masyarakat untuk mencapai tujuan program. Pada proses percepatan penurunan stunting melibatkan beberapa aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Kabupaten Malaka, Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan, Tim Penggerak Penurunan Stunting Tingkat Desa, dan Tenaga Kesehatan (Nakes).

DIAGRAM 1.1

Aktor-aktor yang terlibat dalam Jejaring Kebijakan Pengentasan Stunting di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka



Dari gambar diagram diatas terdapat aktor-aktor yang terlibat dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan perannya. jejaring kebijakan pengentasan stunting di Desa Kereana, Kecmatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka meliputi akor-aktor sebagai berikut yaitu Pemerintah Kabupaten Malaka sebagai pengarah dan pengelola kebijakan, Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan program dan pengelola sumberdaya, Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program masyarakat, Tim Penggerak Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan berfungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan penurunan stunting dan program yang dijalankan di Desa Kereana kepada Pemerintah Kabupaten Malaka, Tim Penggerak Penurunan

Stunting tingkat Desa berfungsi sebagai pelaksana utama dalam percepatan penurunan stunting di Desa Kereana dan melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk intervensi gizi dan kesehatan serta program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik, Tenaga Kesehatan berfungsi sebagai pelaksana utama dalam memberikan pelayanan kesehatan.

TABEL 1.1
ANGKA STUNTING DESA KEREANA

TAHUN	JUMLAH BALITA	JUMLAH STUNTING	PERSENTASE STUNTING
2022	118	24	20,3%
2023	144	58	40,2%
2024	141	26	18,4%

Sumber Puskesmas Botin Leobele, 2024

Berdasarkan data Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah angka Stunting di Desa Kereana pada tahun 2022 menunjukkan jumlah balita 118, jumlah stunting 24 dan presentase stuning 20,3%. Dalam hal ini pada tahun 2022 angka stunting di Desa Kereana mengalami peningkatan dikarenakan kurangnya asupan gizi yang memadai selama masa pertumbuhan anak, pola asuh yang kurang efektif dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi seimbang yang dapat mengakibatkan anak-anak tidak menerima makanan bergizi yang diperlukan dalam masa pertumbuhan anak.

Pada tahun 2023 menunjukkan jumlah balita 144, jumlah stunting 58 dan presentase stunting 40,2%. Dilihat dari tahun sebelumnya presentase stunting

20,3% pada tahun 2022 menjadi 40,2% pada tahun 2023, data ini menunjukkan presentase stunting yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu akses terhadap makanan bergizi yang menurun akibat ekonomi yang memburuk, sanitasi yang tidak memadai dan keterbatasan akses air bersih sehingga menyebabkan resiko penyakit infeksi, kondisi ini dapat memperburuk status gizi anak, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pemberian makanan pendamping ASI yang tepat sehingga menyebabkan pola asuh yang tidak mendukung pertumbuhan anak, tingkat kemiskinan yang tinggi di Desa Kereana yang membatasi kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak.

Pada tahun 2024 presentase stunting di Desa Kereana mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan. Tahun 2022 presentase stunting 20,3%, meningkat pada tahun 2023 dengan presentase stunting 40,2% dan pada tahun 2024 presentase stunting di Desa Kereana menurun menjadi 18,4%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mendukung sehingga pada tahun 2024 mengalami penurunan. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang dapat menjelaskan pencapaian penurunan tersebut, peningkatan akses terhadap makanan yang bergizi melalui program *Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)* yang mendukung pola konsumsi pangan masyarakat di Desa Kereana menjadi lebih sehat, program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), edukasi mengenai pola asuh yang baik dan makanan pendamping ASI yang bergizi, perbaikan sanitasi lingkungan dan akses air bersih

kepada masyarakat Desa Kereana dalam mengurangi resiko penyakit infeksi yang mempengaruhi pertumbuhan anak, dukungan kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana Desa khusus untuk percepatan penurunan stunting, dan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dapat berjalan dengan baik dalam memberikan pendampingan intensif kepada ibu hamil dan balita untuk memastikan pemenuhan gizi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “JEJARING KEBIJAKAN PENGENTASAN STUNTING DI DESA KEREANA, KECAMATAN BOTIN LOBELE, KABUPATEN MALAKA”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana struktur Jejaring kebijakan pengentasan stunting di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Jejaring Kebijakan Pengentasan Stunting di Desa, Kereana Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah di pelajari, terutama jejaring kebijakan dalam penanganan suatu program.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak yang memiliki kepentingan di dalam kebijakan